

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1580/Per-UMP/2012
TANGGAL : 13-6-2012

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENYALURAN
KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BANK BTN Tbk
CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH

NAMA : FADILLA RAINY

NIM : 22 2008 042

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**



**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENYALURAN
KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BANK BTN Tbk
CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

NAMA : FADILLA RAINY

NIM : 22 2008 042

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

PERNYATAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilla Rainy

NIM : 22 2008 042

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 17 Februari 2012

METERAI
TEMPEL

PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20

5403FAAF950147409

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP



Fadilla Rainy

Fadilla Rainy

Motto dan persembahan

Motto :

- ❖ *"MENYENDIRI lebih baik daripada BERKAWAN dengan YANG BURUK dan BERDIAM adalah lebih baik daripada BERBICARA YANG BURUK"*

(Penulis)

*Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada-Mu
ya Allah*

Kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
*Setetes Keringat dan Seuntai Do'a Darimu selangkah
aku akan lebih kuat*
- *Saudara - Saudaraku Tercinta*
Terima kasih atas Support dan Dukungannya
- *My Best Guardian all over the world*
- *Sahabat - Sahabatku*
- *Almamater Tercinta*

PRAKATA



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengendalian Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Era globalisasi saat ini menyebabkan masyarakat harus lebih jeli mencari peluang usaha, akan tetapi masyarakat banyak terbentur dengan adanya modal kerja. Pada saat ini PT. Bank BTN Tbk sebagai Bank Tabungan Negara memberikan kredit modal kerja kepada masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu PT. Bank BTN Tbk mengalami permasalahan dengan adanya kredit macet dalam penyaluran kredit modal kerja. Untuk menjawab permasalahan terjadinya kredit macet maka pihak PT. Bank BTN Tbk melakukan analisis perencanaan dan pengendalian penyaluran kredit modal kerja. Laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab berturut – turut, Bab Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Pembahasan dan Analisis serta Simpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada semua pihak–pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.

2. Bapak M.Taufiq Syamsuddin.,S.E.,Ak.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/ i.
3. Bapak Drs. Sunardi. M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan,S.E.,Ak.,M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Fahmi, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik saya.
6. Pimpinan beserta staf bagian Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta Staf karyawan/i PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang.
8. Ayah tercinta (**Nurizal**) dan Ibunda tercinta (**Susilawati**) serta Adik tercinta (**Asri Dwi Ramadhani**) yang selalu memberikan semangat serta doa` nya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Makasih juga buat “gank Ncoy” Coy Heru, Coy Vita sama Coy yiyik .. hihhi
10. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
11. My Best Guardian all over the world, seseorang yang kurenanakan kelak akan menjadi imam bagiku dan anak-anakku (**Mario Ferdina Utama**) terima kasih atas semua support dan bantuannya dalam pembuatan skripsi ini. Serta Keluarga (Bapak Supriyadinata, Ibu Kartini, Adek Edo, dan Demek)
12. Buat Saurada-saudaraku *myR3DT (mba` Dindin, Kak Aty, Adek Desty dan Amoy) kalian saudara-saudara terbaikku :*

13. Buat Sahabat-sahabat : Tete, Ea', Oneng, Tata, Tinut, Mba, Cece, Kang Leo, Kak Fitrah, Yudi, Kak Deny, Kak Inov, Kak Ajis, Dili.
14. Buat Mba dan Kakak-kakakku : Mba Oka, Kyai Jhon, Kak Doni, Kak Soma, Kak Erik, Kak Verly, Kak Rozak, Kak Dwi, Kak Boma, Kak Sely
15. Makasih juga buat adek-adekku : Keyla, Kiki bontet, Dwi, Arief
16. Makasih buat para "Kubu", makasih juga buat Danang Yonarta.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 29 Maret 2012



Fadilla Rainy

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN LAMPIRAN	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	6
B. Landasan Teori	7
1. Struktur Pengendalian Intern Perkreditan	7
2. Pengertian Kredit dan Kredit Macet.....	7
3. Unsur-unsur Kredit.....	9

4. Jenis-jenis Kredit.....	10
5. Tujuan Kredit.....	12
6. Manfaat Kredit.....	12
7. Sistem Penyaluran Kredit.....	14
8. Prinsip Kehati-hatian Perkreditan.....	16
9. Prinsip atau azaz penyaluran Kredit.....	16
10. Perencanaan Perkreditan.....	18
11. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkreditan.....	19
12. Resiko Perkreditan.....	20
13. Pengertian aktivitas pengendalian.....	20
14. Elemen Pokok aktivitas Pengendalian.....	22
15. Pedoman Sistem pengendalian intern perkreditan.....	22
16. Tujuan Aktivitas Pengendalian.....	25
17. Penggolongan Aktivitas Pengendalian.....	26
18. Ciri-ciri Pengendalian intern yang dapat diandalkan.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Penelitian.....	27
C. Operasionalisasi Variabel	28
D. Data yang Digunakan	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	30

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	31
	B. Pembahasan Penelitian.....	60
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	71
	B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Kredit Modal Kerja	3
Tabel I.2 Laporan Kredit Modal Kerja yang Macet.....	3
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel IV.1 Perencanaan Kredit	66
Tabel IV.2 Kredit Macet	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Riset
2. Sertifikat Membaca dan Hapalan Al-Qur'an
3. Sertifikat Toefel
4. Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
5. Biodata Penulis
6. Lembar Pengesahan Perbaikan Skripsi

ABSTRAK

Fadilla Rainy / 22 2008 042 / 2012 / Analisis Perencanaan dan Pengendalian Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimanakah perencanaan dan pengendalian penyaluran kredit modal kerja pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang dengan variabelnya adalah Perencanaan Kredit dan Pengendalian Kredit. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa media perantara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bukti, catatan/laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Analisis data yang digunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pemberian kredit modal kerja dapat dikatakan cukup baik meskipun angka kredit yang macet masih cukup tinggi serta pengendalian internnya juga sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kelemahan juga.

Kata Kunci : Perencanaan Kredit dan Pengendalian Kredit

ABSTRACT

Fadilla Rainy / 22 2008 042/2012 / Analysis of Distribution Planning and Control of Working Capital At PT. BTN Bank Limited Branch of Palembang.

The purpose of this study was to analyze how planning and control of working capital loans to the PT. BTN Bank Limited Branch of the variables is Palembang Planning Loans and Credit Control. The data used are primary and secondary data. Where the primary data obtained directly from the source without media intermediaries, while the secondary data obtained from the evidence, records / reports that have been arranged in the historical archives of both the published and unpublished. Analysis of qualitative data used.

Based on the results of research conducted it can be concluded that in planning the provision of working capital loans can be quite good despite the bad loan rate is still high and its internal control has also been going well although there are disadvantages as well.

Keywords: Planning Loans and Credit Control



Menurut Jhon A. Pearce II, (2004 : 253) Pengendalian adalah tuntutan, pengamatan, dan penyesuaian kegiatan pekerjaan untuk membantu meyakinkan perusahaan sejalan dengan kebutuhan dan harapan.

Dalam penyaluran kredit pada debitur, bank mempunyai resiko yang sangat besar yaitu resiko kegagalan dan kemacetan dalam penulisan kredit. Secara konseptual, menurut Abdul Halim, (2000 : 267) semakin tinggi resiko suatu pinjaman, maka semakin tinggi tingkat suku bungabank yang dibebankan oleh bank. Dalam menyalurkan kreditnya, bank menggunakan sistem penyaluran kredit yang berlaku umum untuk mengurangi dan menghindari kredit macet. Menurut Abdul Halim, (2000 : 268) Jika bank dalam mengimplikasikan pengendalian menejemennya dengan memperlakukan cabang-cabang sebagai pusat laba, maka kerugian pinjaman yang disebabkan oleh kredit macet perlu diperhatikan karna hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat laba yang akan dihasilkan oleh bank. Semakin besar tingkat kemacetan pelunasan kredit maka akan semakin besar pula resiko kerugian atau pengaruh laba yang akan ditanggung oleh bank.

PT. Bank BTN Tbk cabang Palembang dalam melakukan penyaluran kredit-kreditnya juga telah menggunakan sistem penyaluran kredit yang berlaku umum, namun berdasarkan dari dana kredit yang ada pada PT. Bank BTN Tbk cabang Palembang, Masih terdapat kredit yang pembayarannya tidak lancar (macet) salah satunya kredit modal kerja. Data kredit modal kerja akhir tahun yang pembayarannya tidak lancar (macet) dapat dilihat pada tabel mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Kredit Modal Kerja
Periode tahun 2007-2010

Tahun	Target Kredit	Realisasi Kredit
2007	200.000.000	144.999.156
2008	300.000.000	658.847.336
2009	700.000.000	1.004.142.453
2010	800.000.000	459.602.348

Sumber data : PT.Bank BTN Tbk, 2010

Tabel I.2
Laporan Kredit Modal Kerja yang Macet
Periode tahun 2007-2010

Thn	Lancar	DPK	KL	Diragukan	Macet	NPL
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2007	1,211,973	2,955,011	7,211,375	38,911,471	94,709,326	9,6%
2008	47,098,594	13,840,392	142,406,692	81,137,995	374,363,663	8.9%
2009	475.893.267	182.582.367	74,281,431	93.141.609	178,243,781	4.1%
2010	107.067.199	84,551,935	123.785.443	53,215,995	84,981,776	5,3%

Sumber : laporan kolektibilitas fasilitas pinjaman PT Bank BTN Tbk cabang Palembang, 2010

Keterangan :

Thn : Tahun

DPK : Dalam Pengawasan Khusus

KL : Kurang Lancar

NPL : *Non Performing Loan*

Dari Tabel I.1 diatas menjelaskan jumlah kredit bermasalah pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang pada tahun 2007 sebesar 96,13%; pada tahun 2008 sebesar 88,97%; pada tahun 2009 sebesar 41,10% dan pada tahun

2010 sebesar 53,49%. Kredit bermasalah terlihat lebih besar pada tahun 2008 yaitu sebesar 597.908.350 (dalam ribuan rupiah) atau sebesar 88,97% namun tingkat persentasenya lebih besar pada tahun 2007 yaitu sebesar 96,13%. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2007 pasal 12 ayat 3, menjelaskan bahwa kredit bermasalah dikatakan baik dengan syarat maksimal 5% dari total kredit (kredit bermasalah < 5%) dan kredit lancar dikatakan baik dengan syarat minimal 95% dari total kredit. Kesimpulannya kredit bermasalah yang terjadi pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang mencapai > 5% dari total kredit selama empat tahun terakhir.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kredit yang pembayarannya macet pada kredit modal kerja di PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang dengan mengevaluasi sistem penyaluran kredit dan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini penulis memberi judul :
”Anlisis Perencanaan dan Pengendalian Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah Bagaimanakah perencanaan dan pengendalian penyaluran kredit modal kerja pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pengendalian penyaluran kredit modal kerja pada PT. Bank BTN Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan keilmuan mengenai dunia perbankan khususnya masalah sistem penyaluran kredit dan kredit macet.

2. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi masukan agar sistem penyaluran kredit menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah dan mengurangi kredit macet.

3. Bagi Almamater

Penulisan ini dapat menjadi sebagai bahan perbandingan pada penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ferdy (2002) mengenai Pengaruh Sistem Pengawasan Kredit Macet pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah pengaruh sistem pengawasan kredit macet pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengawasan kredit terhadap kredit macet pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian Ferdy menunjukkan bahwa sistem pengawasan kredit sangat berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet yang ada pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang akan diteliti yaitu kredit macet khususnya kredit modal kerja pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya hanya untuk mengetahui sistem pengawasan kredit terhadap kredit macet pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Penelitian yang akan dilakukan adalah pengevaluasian sistem penyaluran kredit modal kerja serta mencari faktor penyebab terjadinya kredit macet pada kredit modal kerja apakah kredit macet bertambah atau berkurang.

B. Landasan Teori

1. Aktivitas Pengendalian

a. Struktur Pengendalian Intern Perkreditan

Setiap bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

b. Pengertian Kredit dan Kredit Macet

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (trust). Dengan kata lain kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang bersangkutan pada masa yang akan datang guna untuk memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Maya (2009:5) terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran maka anggota masyarakat dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

Golongan 1, yaitu pendapatannya lebih besar dari pada pengeluarannya.
Golongan 2, yaitu pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya.
Golongan 3, yaitu pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya. Khusus golongan 2 tidak ditemukan masalah, sedangkan untuk golongan 1 dengan

adanya surplus pendapatan atas pengeluaran tidak pula menimbulkan hal yang serius, bahkan mungkin merupakan hal yang baik. Yang menjadi persoalan ialah golongan 3 dimana ada defisit pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluar satu-satunya adalah dengan cara menutup defisit tadi dengan pinjaman yang berasal dari golongan 1.

Dalam perkembangan selanjutnyadapat dikemukakan bahwa kredit, merupakan suatu benda yang intangible yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Menurut Rachmat Firdaus (2004 :2) Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja/buruh, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang. Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 10/1998 Pasal 21 ayat 11 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Walaupun banyak definisi yang ditulis antara lain sebagaimana di atas, namun sebagai landasan pembahasan yang menyangkut kredit perbankan, akan berpegang kepada definisi yang terakhir, yaitu menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998.



c. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Beberapa unsur kredit menurut Muchdarsyah (2006:24) adalah:

1). Kepercayaan

Keyakinan dari seorang pemberi bahwa prestasi yang akan diberikan baik berupa uang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2). Waktu

Masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3). Tingkat Resiko

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

4). Prestasi

Yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa uang, barang, dan jasa. Prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

d. Jenis-jenis Kredit

Pada dasarnya kredit hanya ada satu saja bila dilihat dari pengertian yang terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada didalam pengertian kredit, maka menurut Maya (2009:10), kredit dibedakan menjadi :

- 1). Kredit menurut penggunaannya
 - a). Kredit Konsumtif
 - b). Kredit Produktif
- 2). Kredit yang ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya
 - a). Kredit dalam bentuk uang
 - b). Kredit dalam bentuk bukan uang
- 3). Kredit yang ditinjau dari cara penggunaanya (tunai atau tidak tunai)
 - a). Kredit Tunai (cash credit)
 - b). Kredit bukan tunai (non-cash credit)
- 4). Kredit menurut jangka waktu
 - a). Kredit jangka pendek
 - b). Kredit jangka menengah
 - c). Kredit jangka panjang
- 5). Kredit menurut penarikan dan pembayarannya kembali
 - a). Kredit sekaligus
 - b). Kredit rekening koran
 - c). Kredit bertahap
 - d). Kredit berulang

- 6). Kredit menurut sektor ekonominya
 - a). Kredit untuk sektor pertanian
 - b). Kredit untuk sektor konstruksi
 - c). Kredit untuk perdagangan, restoran, dan hotel
 - d).Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
- 7). Kredit dilihat dari segi jaminan/kegunaannya
 - a). Kredit tidak memakai jaminan
 - b). Kredit dengan memakai jaminan/agunan
- 8). Kredit menurut organisasi pemberiannya
 - a). Kredit yang terorganisasi
 - b). Kredit yang tidak terorganisasi
- 9). Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya
 - a). Kredit secara lisan
 - b). Kredit secara pencatatan
 - c). Kredit dengan perjanjian tertulis
- 10). Kredit menurut sumber dananya
 - a). Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat
 - b). Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru
- 11). Kredit menurut negara pemberinya
 - a). Kredit dalam negeri
 - b). Kredit luar negeri
- 12). Kredit menurut kualitas dan kolektibilitasnya
- 13). Kredit menurut status subyek hukum debiturnya

e. Tujuan Kredit

Menurut Thomas Suyatno, (2007 : 14) Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang diterima dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah dasar falsafah Negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

f. Manfaat Kredit

Menurut Rachmat Firdaus, (2004 : 6) Manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1). Manfaat kredit bank bagi debitur

- a). Dapat meningkatkan usahanya dengan tambahan modal kerja
- b). Kredit bank relative mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai
- c). Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relative murah
- d). Terdapat berbagai jenis kredit yang disediakan bank sehingga calon debitur dapat memilih jenis kredit yang paling sesuai
- e). Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya
- f). Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan

2). Manfaat kredit bagi bank

- a). Bank memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur
- b). Dengan penyaluran kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposit dan lainnya
- c). Dengan adanya kegiatan penyaluran kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personil untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha riil di berbagai sektor ekonomi

3). Manfaat kredit bank bagi pemerintah dan Negara

- a). Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan baik secara maupun untuk sektor tertentu saja yang dibentuk melalui proses peningkatan kapasitas produksi
- b). Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja
- c). Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rakyat
- d). Penyaluran kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/Negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah/Negara/daerah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan

4). Manfaat kredit bagi masyarakat

- a) Dengan adanya kredit bank mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat

- b) Untuk masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses penyaluran kredit, misalnya konsultan notaris dan lain sebagainya.

g. Sistem Penyaluran Kredit

Sistem penyaluran kredit adalah cara atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam proses pemberian kredit. Sistem penyaluran kredit ini bertujuan untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon debitur dan juga menghindari terjadinya penyelewengan serta kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur.

Menurut Thomas Suyatno (2007:69) berdasarkan ketentuan umum perkreditan, sistem penyaluran kredit terdiri dari :

1). Tahap-tahap Permohonan Kredit

Data-data dan berkas-berkas yang diajukan dalam permohonan kredit.

Tahap-tahap permohonan kredit yaitu :

- a) Permohonan fasilitas kredit
- b) Berkas
- c) Pencatatan
- d) Kelengkapan dan berkas permohonan

2). Penyidikan dan Analisa Kredit

Penyidikan dan analisa kredit adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja bank untuk para nasabahnya. Penyidikan atau analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur
- b) Pengumpulan data
- c) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran data nasabah
- d) Penyusunan laporan mengenai hasil penyidikan

3). Keputusan Atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya, berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Syarat-syarat umum yang ada pada keputusan permohonan kredit tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit.

4). Pencairan Fasilitas Kredit

Yaitu setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

5). Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibatkan ikan perjanjian kredit. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a).Perhitungan semua kewajiban utang nasabah
- b).Nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar atau blanko check
- c).Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan
- d).Pemberitahuan kepada bagian kas bahwa seluruh hutang telah dilunasi

e).Pembuatan surat penegasan bahwa seluruh hutang telah dilunasi

f).Catat pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern

h. Prinsip Kehati-hatian Perkreditan

Menurut Thomas Suyatno, (2007 : 189-190) Setiap kebijakan perkreditan bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip-prinsip kehati-hatian dan minimal harus meliputi kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian suatu kredit, profesionalisme dan integrasi pejabat perkreditan.

- 1). Kebijakan Pokok Perkreditan
- 2). Pokok-pokok Pengaturan Pemberian Kredit
- 3).Sektor ekonomi, segmentasi pasar, kegiatan usaha dan debitur beresiko tinggi
- 4). Kredit yg perlu dihindari
- 5). Tata cara penilaian suatu kredit
- 6). Profesionalisme dan integrasi pejabat

i. Prinsip atau azas penyaluran Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjamin pengambilan kredit tersebut pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Tidak kembalinya kredit yang telah diberikan oleh suatu lembaga, katakanlah bank, berarti secara tidak langsung mengancam kelangsungan hidup bagi bank itu sendiri. Hal tersebut karna penghasilan bank yang utama ialah berasal dari bunga yang dikenakan terhadap kredit-kredit yang diberikan. Jangan pula dilupakan bahwa dipihak lain dana kredit yang diberikan oleh bank tersebut sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sebagai nasabah bank, yang tertarik menyimpannya karna antara lain diberikan bunga, yang bagi bank sendiri merupakan biaya. Dari kelebihan bunga yang diterima dengan bunga yang dibayar itulah bank membayar gaji pegawainya dengan biaya-biaya lain serta sumber keuntungannya. Karna penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatyan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran pengambilan pokoknya, maka sudah sewajarnya. Andai kata pembelian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi baerbagai prinsip-prinsip atau persyaratan tertentu.

Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya merumuskan persyaratan atau azaz-azaz yang sehat dalam suatu pemberian kredit, walaupun dalam prakteknya konsepsi-konsepsi tersebut tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan.

Menurut Muchdarsyah, (2006 : 267) konsep tentang prinsip-prinsip atau syarat-syarat atau azaz-azaz pemberian kredit bank secara sehat sebagai berikut :

Prinsip-prinsip 5C

- a. *Character* (Watak/kepribadian)
- b. *Capacity* (Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Collateral* (Jaminan atau angunan)
- e. *Condition of economic* (Kondisi perekonomian)

Prinsip-prinsip 5P

- a. *Party* (Golongan)
- b. *Purpose* (Tujuan)
- c. *Payment* (Sumber pembayaran)
- d. *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)
- e. *Protection* (Perlindungan)

j. Perencanaan Perkreditan

Dalam bidang perkreditan bank diwajibkan untuk membuat perencanaan kredit karna setiap kegiatan suatu bank harus diawali dengan suatu perencanaan, demikian pula halnya dengan suatu kegiatan dibidang perkreditan. Perencanaan kredit merupakan suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian kredit harus dilakukan di waktu yang akan datang agar tujuan pemberian kredit yang telah ditetapkan

dapat tercapai. Melalui perencanaan kita juga dapat mengevaluasi apakah suatu kegiatan telah berhasil dalam mencapai tujuan atau sebaliknya, sehingga tidak ada satupun kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan, meskipun rencana yang dibuat tersebut hanya bersifat sederhana. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan kredit menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, (2006 : 111) adalah suatu proses harus dilakukan diwaktu yang akan datang agar tujuan pemberian kredit yang telah ditetapkan akan tercapai.

k. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit bank merupakan salah satu unsur (variabel) dari perencanaan bank secara keseluruhan. Unsur atau variabel perencanaan bank lainnya antarlain perencanaan dana, perencanaan penempatan dana, perencanaan investasi, serta perencanaan pendapatan.

Menurut Rahmat Firdaus (2004 : 30) ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan kredit antara lain sebagai berikut :

- 1). Kondisi perekonomian nasional, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir
- 2). Kebijakan, ketentuan dan peraturan pemerintah dan atau BI dibidang moneter dan bank
- 3). Kemampuan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan biaya yang wajar
- 4). Kemampuan daya serap masyarakat atas kredit yang akan disalurkan oleh bank

I. Resiko Perkreditan

Sistem bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai resiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tiada resiko. Akan tetapi, setiap bisnis mempunyai resiko dan tingkat resiko yang berbeda satu sama lain. Pemberian kredit sudah pasti bahkan menghindari resiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya. Menurut Veithzal, (2006 : 114) berbagai resiko yang perlu menjadi pengelola bank, antara lain sebagai berikut :

- 1). Resiko Politik
- 2). Resiko Sifat Usaha
- 3). Resiko Geografis
- 4). Resiko persingan
- 5). Resiko Ketidakpastian Usaha

2. Pengendalian InternPerkreditan

a. Pengertian Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan suatu sikap untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kemacetan atau hambatan dalam pembayaran atau pelunasan kredit yang berasal dari pihak internal dan pihak eksternal. Sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi dapat dilihat dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku pada bagian atau bidang-bidang yang ada didalam suatu unit usaha. Fungsi pengawasan dalam bidang perkreditan sangat penting karna

peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut adalah untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

Dalam pemberian kredit harus ada pengawasan yang disebut dengan pengawasan ganda (dual control), yaitu pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya dan pengecekan kembali ini dilakuakn oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap tahapan dalam pemberian kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan kredit atau kredit yang dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Veithzal, (2006 : 574) dual control ini dapat terjadi karna adanya pembagian tugas atau fungsi. Account officer melakuakn rechecking atas kesimpulan analisis kredit tersebut tentang keakuratannya. Bentuk lain dari dual control melalui mekanisme internal check, yaitu komputer akan menghasilkan exceptional report pada output hariannya bila seorang teller melakukan pembayaran overdraft atau yang melampaui kelonggaran tarik seorang nasabah. Pelaksanaan dual control dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah melekat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit-unit terkait berikut ini :

- 1). *Account Officer* atau *Loan Officer*
- 2). *Account Officer Supervisor*
- 3). *Branch Manager* (Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah)
- 4). *Loan Administration*
- 5). *Unit Accounting Information*

b. Elemen Pokok Aktivitas Pengendalian

Menurut Bodnar, (2004 : 140) elemen pokok aktivitas pengendalian yang baik harus meliputi :

- 1). Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas untuk mengurangi peluang seseorang dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan.
- 2). Prosedur mencakup perancangan dan pengangguran dokumentasi dan catatan yang berguna untuk memastikan pencatatan transaksi dan kejadian yang tepat.
- 3). Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai dengan otoritas manajemen
- 4). Cek independen dan peninjauan dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kekayaan perusahaan dan kerja
- 5). Pengendalian proses informasi diterapkan untuk mengecek kelayakan otoritas, keakuratan, kelengkapan setiap transaksi

c. Pedoman Sistem pengendalian Intern Perbankan

Sistem pengendalian dalam proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran tercapai baik bagi bank dan nasabah, serta untuk menghindari kredit macet.

Menurut SE No.05/22.DPNP Bank Indonesia, penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan meliputi :

1). Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian

- a). Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern.
- b). Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern.
- c). Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelapor yang jelas.
- d). Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.

2). Identifikasi dan penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul sesuai dengan kondisi bank, antara lain :

- a). Perubahan kegiatan operasional bank
- b). Perubahan susuna personalia
- c). Perubahan sistem informasi
- d). Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu

e).Sistem pengendalian intern baik harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku

5) Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan

- a) Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern
- b) Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya kondisi intern dan ekstern
- c) Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern

d. Tujuan Aktivitas Pengendalian

Karena aktivitas pengendalian merupakan bagian dari struktur pengendalian intern, maka dari hal ini terdapat beberapa tujuan dari pengendalian intern antara lain terdapat beberapa tujuan dari pengendalian antara lain yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:194) untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu :

- 1) Keandalan informasi keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektivitas dan efisiensi

Tujuan aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut :

- 1) Manajemen aktiva perusahaan
- 2) Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan
- 4) Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan

e. Penggolongan Aktivitas Pengendalian

Menurut Mulyadi (2002:189) aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan kedalam berbagai kelompok, salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengendalian pengolahan informasi
- 2) Pengendalian fungsi yang memadai
- 3) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

f. Ciri-ciri Pengendalian Intern yang dapat diandalkan

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia suatu sistem pengendalian intern dianggap dapat diandalkan (*reliable*) apabila terdapat ciri atau sifat utama , yaitu :

- 1). Pendekatan Pihak bank terhadap Kredit Macet
- 2). Pemantauan pihak bank terhadap kredit macet dalam hal ini Kredit dalam Pengawasan Khusus
- 3). Pengevaluasian pihak bank terhadap Kredit Macet

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2003 : 11) Jenis penelitian jika dilihat dari jenis eksplanasi terdiri dari tiga jenis penelitian yaitu :

1). Penelitian deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel / lebih tanpa membuat pertandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2). Penelitian Kompetitif

Penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel tetapi yang untuk lebih dari satu atau lebih dalam waktu yang berbeda.

3). Penelitian Assosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bersifat menjelaskan.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank BTN Tbk Cabang Palembang yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman No. 125 KM 4,5 Palembang 30128.

C. Operasional Variabel

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan berikut dapat diukur.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Perencanaan Kredit	Perencanaan kredit adalah suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian kredit harus dilakukan di waktu yang akan datang agar tujuan pemberian kredit yang telah ditetapkan dapat tercapai.	1. Tahap-tahap permohonan kredit 2. Penyidikan dan analisis kredit 3. Pencarian fasilitas kredit 4. Pelunasan fasilitas kredit
2	Pengendalian kredit	Suatu sikap untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kemacetan atau hambatan dalam pembayaran atau pelunasan kredit yang berasal dari pihak internal dan pihak eksternal	1. Pendekatan Pihak bank terhadap Kredit Macet 2. Pemantauan pihak bank terhadap kredit macet dalam hal ini Kredit dalam Pengawasan Khusus 3. Pengevaluasian pihak bank terhadap Kredit Macet

Sumber : Penulis, 2012

D. Data yang diperlukan

Untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan sangat diperlukan data-data yang berhubungan. Adapun cara memperoleh data terdiri dari yaitu :

1). Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini PT Bank BTN Tbk cabang Palembang.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data penulis diperoleh dengan menyakan atau wawancara langsung kepada karyawan PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang bagian tentang sistem penyaluran kredit modal kerja dan faktor penyebabnya. Data sekunder penulis diperoleh dari data laporan kolektibilitas pinjaman, dan formulir-formulir pengajuan kredit untuk kredit modal kerja.

E. Teknik Pengumpulan data

Menurut Indriantoro dan Bambang (2002:146-147) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Kuisisioner (*Angket*)

Kuisisioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

4. Tes (*Test*)

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

F. Teknik Analisis

Menurut Mudjarat, (2003 : 124) metode analisis data terdiri dari :

1). Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberi penjelasan dalam bentuk kata-kata atau bentuk kalimat

2). Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam suatu skala menarik atau angka.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif.

adanya *Koninklijk Besluit* No. 27 di Hindia Belanda atau dalam istilah Indonesia istilah ini lebih familiar dikenal dengan nama *surat keputusan* yang menyatakan adanya pendirian POSTSPAARBANK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, maka resmi sudah nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi BANK TABUNGAN NEGARA. Setahun kemudian dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1964 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 51 ditetapkan Undang-Undang tentang Bank Tabungan Negara yang mencabut Undang-Undang No. 36 tahun 1953 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 tahun 1963.

Dengan alasan program ekonomi, maka Bank Tabungan Negara diintegrasikan kedalam Bank Indonesia berdasarkan Ketetapan Presiden No. 11 tahun 1965 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 57 yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 1965. Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, seluruh Bank Umum Milik Negara termasuk Bank Tabungan Negara, beralih statusnya menjadi Bank Tunggal Milik Negara, yang pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1968 yang sebelumnya diprakarsai dengan Undang-Undang Darurat No. 50 tahun 1950 tanggal 9 Pebruari 1950 resmi sudah status Bank Tabungan Negara sebagai salah satu bank milik negara dengan tugas utama saat itu untuk memperbaiki perekonomian rakyat

melalui penghimpunan dana masyarakat terutama dalam bentuk TABUNGAN. Pada awal berdirinya Bank Tabungan Negara memiliki modal disetor yang sekaligus sebagai modal dasar pendirian BTN, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kemudian sejarah BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh BTN di negeri ini. Waktu demi waktu akhirnya terus mengantar BTN sebagai satu-satunya bank yang mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR-BTN. Dan berkat KPR pulalah BTN terus dihantarkan pada kesuksesannya sebagai bank yang terpercaya, handal dan sehat.

Penunjukan BTN sebagai wadah pembiayaan rumah rakyat pada tahun 1974 oleh pemerintah sudah pasti bukan tanpa alasan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah kebawah itulah maka menghantarkan BTN saat itu sebagai lembaga keuangan dengan fungsi menyiapkan pendanaan pembiayaan pembangunan perumahan tersebut melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pada tahun 1976 telah ditandai dengan sejarah realisasi KPR pertamakalinya di Indonesia. Realisasi KPR pertama tersebut adalah di

kota Semarang dengan 9 unit rumah. Kemudian pada tahun yang sama menyusul di kota Surabaya dengan 8 unit rumah sehingga total KPR yang berhasil direalisasikan BTN pada tahun 1976 adalah sejumlah 17 unit rumah dengan nilai kredit pada saat itu sebesar Rp. 37 Juta.

Realisasi KPR di Semarang dan Surabaya pada tahun 1976 tersebut kemudian diikuti realisasi KPR di kota-kota lain. Sukses realisasi KPR tahun 1976 inilah akhirnya membawa kesuksesan BTN dalam merealisasikan KPR pada tahun-tahun berikutnya.

Sukses KPR dengan realisasi pertama di Semarang pada tahun 1976 tersebut telah membawa keyakinan manajemen BTN untuk menjadikan bisnis perumahan tersebut sebagai bisnis utama BTN. Hal ini tampak jelas pada misi BTN yaitu melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi kearah kesejahteraan rakyat banyak dengan mengkhhususkan diri melaksanakan kegiatannya dalam bidang pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat.

Akhirnya sejarah mencatat dengan sukses BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR tersebut telah membawa status BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) pada tahun 1992. Status persero ini memungkinkan BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum. Dan memang untuk mendukung bisnis KPR tersebut, BTN mulai mengembangkan produk-produk layanan perbankan

sebagaimana layaknya bank umum. BTN juga memiliki produk Tabungan, Giro, Deposito, ataupun layanan perbankan lainnya yang dimiliki oleh bank lain.

Sukses BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status BTN sebagai bank umum menjadi Bank Devisa pada tahun 1994. Layanan bank dalam bentuk penerbitan Letter of Credit (L/C), pembiayaan usaha dalam bentuk dollar, dll bisa diberikan BTN dengan status tersebut. Dengan status baru ini tidak membuat BTN lupa akan fungsi utamanya sebagai penyedia KPR untuk masyarakat menengah kebawah. Diakui memang bisnis perbankan yang semakin berkembang menuntut BTN untuk terjun sebagai pemenuhan dari statusnya sebagai bank umum dan bank devisa. Krisis ekonomi yang meluluh lantakkan sendi-sendi perekonomian Indonesia membuat keyakinan BTN untuk memutar kembali bisnis utamanya di bidang perumahan.

Pada akhir 2009 PT. Bank BTN mengubah perusahaannya menjadi perusahaan yang *Go Public*, yaitu sebagian saham dapat dibeli oleh masyarakat tidak sepenuhnya milik negara.

PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang yang beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 125 KM 4,5 Palembang, mulai difungsikan sebagai kantor Cabang Palembang, dimana dulunya kantor cabang ini berada di Ruko Ilir Barat Permai yang beralamat di jalan Letkol Iskandar Palembang.

b. Visi dan Misi PT. Bank BTN Tbk cabang Palembang

Tahun 1997 manajemen BTN menetapkan kebijakan strategisnya untuk mengembalikan BTN pada bisnis intinya, yaitu bisnis pembiayaan perumahan. Keputusan ini pada akhirnya banyak membantu BTN dalam proses rekapitalisasi atau penambahan modal oleh pemerintah bagi bank yang *menderita sakit* karena pengaruh krisis ekonomi. Dengan rekapitalisasi tersebut, manajemen BTN telah menetapkan paradigma baru untuk mendukung Misi dan Visi Bank BTN yaitu :

Adapun Misi PT. Bank BTN Tbk adalah :

- 1) Mengembangkan dan membangun pertumbuhan perekonomian daerah, dengan menumbuh kembangkan kegiatan perkreditan bank yang langsung menyentuh masyarakat atau pengusaha kecil atau mikro.
- 2) Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- 3) Sebagai pemegang kas daerah atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- 4) Sebagai agen pembangunan.
- 5) Membantu dan mengembangkan pengusaha golongan ekonomi lemah.
- 6) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih tanggap terhadap tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar.
- 7) Mengoptimalkan keunggulan bisnis retail banking dan mengembangkan corporate banking.

Adapun Visi PT. Bank BTN Tbk adalah :

- 1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri ikutannya kepada lapisan masyarakat menengah kebawah, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.
- 2) Menyiapkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi.
- 3) Memenuhi komitmen kepada pemegang saham, yaitu menghasilkan laba dan pendapatan per saham yang tinggi serta ikut mendukung program pembangunan perumahan nasional.
- 4) Menyelenggarakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*.
- 5) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan maka sebuah perusahaan harus mengadakan pembagian atau penggolongan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Selain itu juga diperlukan adanya pelimpahan wewenang jelas dan tegas dari atasan sampai kepada bawahan yang berhubungan sehingga efektivitas kerja dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi menurut Drs. M. Manullang (1996:51) adalah :

”Gabungan secara sistematis tentang hubungan-hubungan, kerjasama dari orang-orang yang terdapat pada perusahaan dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan.”

Struktur Organisasi PT. Bank BTN Tbk Kantor cabang Palembang mempunyai fungsi yang berhubungan langsung dengan nasabah (*front office*) dan fungsi pendukung (*back office*). Dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan aktivitas dari setiap pekerja dan unit melalui struktur organisasi cabang yang lebih sederhana dan dinamis serta mencapai visi jangka panjang BTN.

Setiap cabang akan mempunyai *line modul inti* yaitu manajemen cabang (*branch management*), pelayanan retail (*retail service*), operasi (*operation*), akuntansi dan kontrol (*accounting and controlling*), dan penyelamatan kredit (*loan recovery*) yang dapat ditambah tergantung dari kebutuhan bisnis dan jumlah transaksi.

Berdasarkan ketetapan dieksi PT. Bank BTN Tbk, susunan organisasinya terdiri dari :

1). Kepala Kantor cabang (*Branch Manager*)

Kepala Kantor Cabang adalah pejabat tinggi yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin kantor cabang atau aktivitas sehari-hari sesuai bidangnya masing-masing dan dibantu seorang sekretaris.

2). Wakil Kepala Cabang (*Deputy Branch Mnager*)

Wakil Kepala Cabang adalah seorang pejabat yang berada dibawah kantor cabang yang diberikan tanggun jawab untuk memimpin

pelaksanaan aktivitas sehari-hari dibidangnya masing-masing terdiri dari :

- a). Wakil Kepala Cabang bidang retail (Kepala bidang Operasional sesuai dengan struktur organisasi).
- b). Wakil Kepala Cabang Operasional (Kepada bidang Operasional sesuai dengan struktur organisasi).
- c). Asisten *Branch Manager* (Asisten Kepala Cabang) adalah seorang pejabat yang berada di bawah kepala cabang dan diberi tanggung jawab untuk mengorganisasikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan tugas dan pekerjaan dalam unit kerja yang sesuai dengan bidangnya dikantor cabang serta tugas khusus yang diberikan oleh kepala cabang. Terdiri dari :
 - (1). Asisten Kepala Cabang bidang akuntansi dan kontrol sesuai dengan struktur organisasi.
 - (2). Asisten Kepala Cabang bidang penyelamatan kredit sesuai dengan struktur organisasi.
 - (3). Sekretaris cabang yang bertugas mengatur segala aktivitas manajemen dan administrasi kesekretarisan cabang.
 - (4). Kepala seksi sektor pelayanan yang bertugas memegang cabang umum memimpin seksi dan terdiri dari :
 - (a). Kepala Seksi *Customer service*
 - (b). Kepala Seksi *Teller Service*
 - (c). Kepala Seksi *Transaction and Processing*

- (d). Kepala Seksi *Loan Administration*
- (e). Kepala Seksi *General Branch Administration*
- (f). Kepala Seksi *Book Keeping and Control*
- (g). Kepala Seksi *Financial Reporting and Analysis*
- (h). Kepala Seksi *Collection and Workout / Loan Recovery*

Dalam tiap- tiap unit kerja berisikan petugas (*job name*) yang melaksanakan operasional secara terperinci dan jelas agar kegiatan tersebut dapat dioptimalkan dan sukses mencapai sasaran.

Uraian pekerjaan disajikan sebagai berikut :

1). Kepala Cabang (*Branch Manager*)

Tugas pokok dan fungsi seorang Kepala Cabang (*Branch Manager*), yaitu:

- a). Memimpin cabang di wilayah kedudukannya dan bertindak untuk dan atas nama direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hubungannya dengan pihak lain atau pihak ketiga di wilayah kerjanya yang berkaitan dengan usaha bank.
- b). Mengelola keuangan dan harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan kantor cabang berdasarkan prinsip- prinsip ketatalaksanaan yang sehat dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan direksi.
- c). Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kerja untuk menunjang operasional kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d). Pemeliharaan hubungan kedinasan dalam rangka kerjasama antar instansi pemerintah maupun swasta ataupun lembaga perbankan/nonperbankan di wilayah kantor cabang untuk memperlancar kegiatan usaha bank.
 - e). Mengoptimalkan pendayagunaan tenaga kerja dan peralatan guna meningkatkan motivasi kerja, keahlian dalam bidangnya, dan hubungan yang baik dengan sesama karyawan sehingga tercapai kerja yang maksimal.
 - f). Bertanggungjawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan secara berkala dan laporan lainnya yang berhubungan dengan kantor cabang.
 - g). Mengusahakan pengambilan kredit yang telah diterbitkan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - h). Mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap tugas- tugas yang diberikan kepada bawahan dengan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tersebut.
- 2). Wakil Kepala Cabang (*Deputy Branch Manager*)
- Fungsi pokok Wakil Kepala Cabang adalah untuk membantu kepala cabang dalam pengelolaan kegiatan usaha bank khususnya mengenai tugas- tugas yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menurut organisasi termasuk ke dalam lingkup pengelolaan dan pengawasan Wakil Kepala Cabang.

3). Kepala Layanan Kredit (*Loan Service Head*)

Tugas dan fungsi seorang Kepala Layanan Kredit (*Loan Service Head*), yaitu :

- a). Memastikan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan *Loan Service*.
- b). Memastikan bahwa semua nasabah memperoleh pelayanan dengan kualitas pelayanan yang prima mulai dari permohonan kredit sampai dengan akad kredit.
- c). Memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan baik.
- d). Memastikan bahwa semua klaim debitur dapat diselesaikan dengan baik.
- e). Melakukan penjualan produk bank.

4). Kepala Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (*Loan Recovery Head*)

Tugas dan fungsi seorang Kepala Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (*Loan Recovery Head*), yaitu :

- a). Memastikan peningkatan nilai kualitas aktiva produk cabang.
- b). Menekan kredit yang bermasalah menjadi sekecil mungkin.
- c). Memastikan bahwa bank bebas dari masalah hukum yang merugikan.
- d). Mewakili PT. Bank Tabungan Negara dalam acara resmi bila kepala cabang tidak ada di tempat/berhalangan hadir.

5). Petugas Layanan Kredit (*Loan Service Officer*)

Tugas pokok dan fungsi seorang Petugas Layanan Kredit (*Loan Service Officer*), yaitu :

- a). Memberikan penjelasan kepada nasabah semua produk kredit baik KPR, Bapertarum, hal lain yang berhubungan dengan layanan kredit.
- b). Melayani kalim debitur (baik debitur datang maupun lewat surat), pelunasan, PUL, permintaan rekening koran, dan surat- surat yang berkaitan dengan kredit.
- c). Melakukan usaha pemasaran/penjualan produk kredit.

6). Cabang Administrasi Umum (*General Branch Administration*)

General Branch Administration bertugas memantau anggaran biaya dan belanja cabang, bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan semua inventaris cabang setiap saat dan memastikan file kepegawaian diadministrasikan secara efektif.

7). Kepala Administrasi kredit (*Loan Administration Head*)

Tugas pokok serta fungsi seorang Kepala Adminidtrasi kredit (*Loan Administration Head*), yaitu :

- a). Memastikan kecepatan dan ketepatan proses kredit kebijakan dan prosedur yang ada.
- b). Memastikan bahwa semua dokumen yang disimpan adalah aman dan lengkap baik dokumen pokok maupun pendukungnya.

- c). Memastikan kecepatan dan ketepatan proses Bapertarum plus sesuai dengan kebijakan dan proses yang ada.
 - d). Memberikan informasi kepada *teller service* untuk pencairan dana yang akan dikeluarkan.
 - e). Memasarkan produk kredit umum.
 - f). Memastikan bahwa setiap petugas administrasi kredit telah membuat sasaran dan rencana tindakan.
 - g). Melakukan analisa kredit operasi.
- 8). Petugas Administrasi Kredit (*Loan Administration Officer*)
- Seorang Petugas Administrasi Kredit (*Loan Administration Officer*) memiliki tugas dan fungsi, diantaranya :
- a). Menindak lanjuti proses keputusan untuk persiapan kredit.
 - b). Melakukan pencairan dan realisasi kredit, pencairan dan jaminan.
 - c). Memproses permohonan bantuan Bapertarum
- 9). Layanan Nasabah (*Customer Service*)
- Tugas dan fungsi seorang Layanan Nasabah (*Customer Service*), diantaranya :
- a) Memberikan pelayanan tabungan loket cabang.
 - b) Memberikan pelayanan tabungan kantor cabang.
 - c) Melayani proses pembukaan rekening rupiah dan valas
 - d) Melayani proses perpanjangan rekening rupiah dan valas.
 - e) Melayani proses penutupan rekening rupiah dan valas.
 - f) Memproses pembayaran bunga deposito.

- g) Pelayanan nasabah lainnya.
- h) Administrasi transaksi loket cabang.
- i) Melakukan penjualan dana keluar.
- j) Memelihara *Subsidiary Ledger* (SL).

10). Layanan Teller (*Teller Service*)

Layanan Teller (*Teller Service*) memiliki fungsi, diantaranya sebagai berikut :

- a) Melayani setoran tunai angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) cabang sendiri dan cabang lain.
- b) Melayani setoran dan pembayaran deposito.
- c) Melayani penabungan dan penarikan tabungan tunai.
- d) Menerima transaksi giro.
- e) Mengelola kas cabang.
- f) Melayani kebutuhan nasabah lainnya.
- g) Melakukan transaksi penjemputan uang tunai.
- h) Melakukan penjualan dana keluar

11). Pembukuan dan Kontrol (*Book Keeping and Control*)

Tugas dan fungsi pokok Pembukuan dan Kontrol (*Book Keeping and Control*), yaitu :

- a) Mengontrol transaksi harian.
- b) Mengelola buku besar cabang.
- c) Mengelola pembuktian transaksi.
- d) Pembuatan jurnal transaksi.

e) Melakukan pencocokan GL dan SL.

12). Pelaporan dan Analisa (*Financing Reporting and Analysis*)

Pelaporan dan Analisa (*Financing Reporting and Analysis*) memiliki tugas dan fungsi, diantaranya sebagai berikut :

- a) Membuat laporan cabang.
- b) Sistem informasi manajemen cabang.
- c) Mengadministrasikan pelaporan cabang.

d. Aktivitas Usaha

Seperti halnya Bank Umum Konvensional lainnya, secara garis besar produk- produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BTN Tbk mempunyai tiga bidang usaha yaitu :

- 1) Produk Dana, diantaranya sebagai berikut :
 - a). Deposito Berjangka Rupiah, merupakan simpanan pihak ketiga yang diselenggarakan oleh PT. Bank Tabungan Negara yang penarikannya ditentukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam bentuk mata uang Rupiah dan menguntungkan.
 - b). Depoito Berjangka Valas, merupakan simpanan berjangka dalam mata uang US \$ yang menguntungkan.
 - c).Giro Dollar, merupakan kemudahan bertransaksi dengan fleksibilitas tinggi dalam bentuk mata uang US \$.
 - d).Giro Rupiah, merupakan kemudahan bertransaksi dengan flesibilitas tinggi dalam bentuk mata uang Rupiah.

- e). Sertifikat Deposito, merupakan simpanan dalam bentuk deposito berjangka yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
 - f). Tabungan Batara Prima, meliputi salah satu jenis tabungan bebas atau simpanan pihak ketiga yang diselenggarakan oleh PT. Bank Tabungan Negara , dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui loket PT. Bank Tabungan Negara atau ATM.
 - g). Tabungan e'Batapos, merupakan produk Tabungan PT. Bank Tabungan Negara yang diselenggarakan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui seluruh loket Kantor Pos yang telah Online di seluruh Indonesia.
 - h). Tabungan Haji Nawaitu, merupakan tabungan atau simpanan yang diperuntukkan bagi calon jama'ah haji dalam rangka persiapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.
- 2) Produk Jasa, diantaranya sebagai berikut :
- a). Kartu ATM batara, yaitu merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah Tabungan dan Giro (Rp-Perorangan) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai macam transaksi melalui seperti tarik tunai di mesin ATM, pembayaran tagihan dan berbelanja.
 - b). Kiriman Uang (*Transfer*), merupakan layanan yang diberikan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada nasabahnya yang ingin

- mengirim uang ke kota lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c). Bank Garansi, merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wan prestasi) kepada pihak yang menerima jaminan.
- d). *Batara Payroll*, merupakan layanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bagi Pengguna Jasa (Perusahaan, Perorangan, Lembaga) dalam mengelola pembayaran Gaji, THR dan Bonus serta kebutuhan financial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa.
- e). Inkaso, merupakan penagihan yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada pihak yang wajib membayar berdasarkan suatu warkat inkaso untuk kepentingan dan atas resiko pihak yang mempunyai tagihan.
- f). Inkaso Luar Negeri (*Collection*), merupakan Jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) untuk menagihkan pembayaran atas suatu warkat/dokumen berharga kepada pihak ketiga yang berada di luar negeri menggunakan jasa bank koresponden.
- g). *Safe Deposito Box BTN*, merupakan jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dalam bentuk penyewaan Wadah atau Box yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting untuk jangka waktu tertentu.

- h). Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), yaitu bentuk pelayanan dari PT. Bank Tabungan Negara, memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dan SISKOHAT.
 - i). *Payment Point*, merupakan fasilitas bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin bulan. Pembayaran tagihan yang dapat dilakukan saat ini diantaranya Telkom, PLN Online, Telkomsel, Pajak (Logo Pajak), dan PDAM.
 - j). *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, merupakan sistem transfer dana online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per-transaksi secara individual. Jenis layanan seperti Single Credit Transaction, Multiple Credit Transaction.
 - k). *Remittance Service*, merupakan jasa pelayanan Kiriman Uang (KU) yang dilaksanakan atas kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan BSN (Bank Simpanan Malaysia) Malaysia terhadap TKI di Malaysia yang ingin mengirim uang atau dana ke Indonesia. Sasaran pengiriman *Remittance Service* berupa :
 - a). *Telegraphic Transfer (Telex)*
 - b). *Warkar IGGO (International Guaranteed Giro Order)*
- 12). Ekspor dan Impor
- 13). Jual Beli valuta asing (*Money Changer*) merupakan jasa pelayanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang ingin menjual atau

membeli atas mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

- 14). *Traveller Check*, merupakan suatu cek yang dikeluarkan oleh lembaga penerbit atau issuer sebagai sarana pengganti uang tunai dalam melakukan perjalanan, baik di dalam maupun diluar negeri. Traveller Check dapat dibeli pada kantor kas cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang berstatus cabang devisa dan cabang Money Changer.
 - 15). *SPP Online Perguruan Tinggi*, merupakan layanan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan *delivery chanel* menerima Setoran Biaya- biaya pendidikan secara Online.
- 3) Produk Kredit, diantaranya sebagai berikut :
- 1). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi, kredit perumahan yang diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan termasuk ke dalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 2). Kredit Griya Multi, merupakan kredit yang diperuntukkan bagi pemohon/calon debitur perorangan yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan bank teknis, dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum.

- 3). Kredit Griya Sembada, merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian atau pengadaan/pembangunan proyek perumahan atau bangunan rumah tinggi guna disewakan.
- 4). Kredit Griya Utama, merupakan kredit yang diperintukkan bagi pemohon/calon debitur yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli tanah dan bangunan. Maksimal KGU yang dapat diberikan adalah sebesar 80 % untuk debitur Non-Kolektif dan sebesar 90 % untuk debitur Kolektif, besaran tersebut dari harga jual setelah discount atau nilai taksasi pasar wajar yang dilakukan oleh penilai (*appraisal*).
- 5). Kredit Pemilikan ruko, merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk membeli Rumah Toko guna dihuni dan digunakan sebagai toko.
- 6). Kredit Swa griya, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan rumah di atas tanah yang telah dimiliki oleh pemohon.
- 7). Kredit Swadana, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa penahanan sebagian atau seluruh simpanan (baik berupa tabungan maupun deposito) yang disimpan di bank.
- 8). Real Cash, merupakan fasilitas pinjaman yang dapat dicairkan sewaktu- waktu bila dibutuhkan (*stand-by loan*)
- 9). Kredit Investasi, merupakan kredit yang disediakan oleh bank dalam rangka pembiayaan investasi khususnya bagi sektor- sektor

industri yang terkait dengan perumahan atau usaha- usaha yang dapat menunjang sektor- sektor dimaksud.

- 10). Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemborong untuk membantu modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.
- 11). Kredit Yasa Griya, yaitu kredit yang diberikan bank kepada developer untuk membantu modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan finishing, dan biaya prasarana serta sarana.
- 12). Garansi Bank.

2. Perencanaan Pemberian Kredit PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang

PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang dalam melakukan pemberian kredit modal kerja terhadap nasabah yang akan melakukan pengajuan perkreditan modal kerja akan melalui tahapan-tahapan tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk :

- a). Keamanan dan kelancaran pembiayaan serta pembayarannya
- b). Nasabah yang diberi pinjaman modal kerja benar-benar mampu dan layak untuk diberi pinjaman
- c). Pemberian kredit pinjaman yang dilakukan benar-benar untuk nasabah tersebut bukan merupakan pinjaman nama atau pinjaman dana

Adapun Prosedur-prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang adalah sebagai berikut :

(1) Besar Kredit

(a) Maksimum angsuran perbulan 50% dari *Take Home Pay* (THP) atau pendapatan bersih setelah dikurangi potongan-potongan setiap bulan.

(b) Batas maksimum Plafon / jumlah pinjaman kredit pada kredit

$$\text{modal kerja, yaitu : } \frac{I}{I + (I \times n)} \times n (50\% \times \text{THP})$$

(2) Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit untuk jangka pendek konstruksi 1 tahun(100-1M), kredit investasi atau angsuran usaha dagang 3-5 tahun (100 juta – 1M).

(3) Agunan

Agunan utama yang digunakan pada kredit modal kerja jaminan sertifikat tanah, bangunan, sertifikat deposito, BPKB.

Prosedur penyaluran kredit yang ditetapkan kredit modal kerja yaitu :

- (a) Suat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- (b) Surat Tanda Izin Pindah Industri Kecil (STIPK)
- (c) Akte Pendirian
- (d) Surat Izin Tempat Usaha
- (e) Surat Izin UU Gangguan
- (f) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
- (g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (h) Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PT. Bank BTN Tbk adalah sebagai berikut :

1) Maksimum Kredit

Maksimum kredit disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dari kemampuan pembayaran dari pemohon dengan batasan maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

2) Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit untuk jangka pendek konstruksi 1 tahun (100juta-1M), kredit investasi atau angsuran usaha dagang 3-5 tahun (100juta-1M).

3) Ketentuan Bunga

Besarnya tingkat bunga adalah 12% per tahun.

4) Pembayaran Kembali

Pembayaran kembali kredit dilaksanakan secara angsuran setiap bulan yaitu sebesar angsuran pokok ditambah bunga.

5) Denda Tunggakan

Angsuran yang tertunggak pembayarannya baik berupa angsuran pokok dan atau bunga dikenal denda tunggakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan bunga.

6) Biaya Pembukuan Kredit

Calon debuti diwajibkan memiliki dan menyediakan dana sendiri berkenan dengan biaya pembukuan kredit yang terdiri dari :

- a) Provinsi kredit sebesar 1% (satu persen) dari maksimum kredit.
 - b) Biaya materai sesuai kebutuhan.
 - c) Premi asuransi jiwa.
 - d) Premi asuransi kebakaran.
- 7) Asuransi
- a) Asuransi kebakaran
Tempat yang dibiayai dengan kredit wajib ditutup pertanggungan asuransi kebakaran pada perusahaan asuransi yang ditunjuk bank.
 - b) Asuransi jiwa
Debitur dihimbau (tidak wajib) untuk menutup pertanggungan asuransi jiwa, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk bank.

3. Prosedur Perencanaan Penyaluran Modal Kerja PT. Bank BTN Tbk

Cabang Palembang

a. Tahap Permohonan Kredit

Dalam tahap perencanaan penyaluran modal kerja pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang yang berhubungan dengan tahap permohonan kredit yaitu :

- 1). Melakukan wawancara awal dengan calon nasabah
- 2). Mengumpulkan informasi-informasi mengenai calon nasabah

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi dasar antara calon nasabah dengan perusahaan. Walaupun tahap permohonan kredit telah dilaksanakan oleh PT. Bank BTN Tbk tetapi karyawan tidak

melaksanakannya dengan baik seperti tidak melakukan survey dengan benar, tidak melakukan survey lingkungan dan pemalsuan data-data calon nasabah agar layak disetujui sehingga data-data yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan.

Karyawan juga tidak diberikan sanksi tegas apabila diketahui bahwa karyawan tersebut tidak melakukan survey atau memalsukan data-data calon nasabah sehingga hal tersebut akan terus terjadi kembali baik akan dilakukan kembali oleh karyawan tersebut maupun oleh karyawan lain. Pada akhirnya bagian marketing akan sembarangan melakukan analisa calon nasabah dan mengakibatkan kredit macet.

b. Analisa Kredit

Analisis kredit yang berhubungan dengan pengendalian pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang yaitu:

- 1). Penerimaan aplikasi kredit dari nasabah dianalisis oleh fungsi marketing dalam hal ini yaitu *Loan Administration Head*.
- 2). Bagian *Loan Administration Head* melakukan pengecekan data calon debitur melalui KTP calon debitur untuk mengetahui history pembayaran debitur tersebut pada bank lain.
- 3). Analisis *Loan Administration Head* terhadap hasil survey kelayakan konsumen yang dilakukan didukung dengan data-data konsumen dan data-data kredit

- 4). Analisis dari komite kredit analis terhadap aplikasi kredit yang direkomendasikan supervisor dan dengan melakukan analisa ulang, verifikasi dan konfirmasi ke konsumen
- 5). Analisis pimpinan cabang terhadap aplikasi kredit yang direkomendasikan supervisor dan kredit analis untuk mendapatkan persetujuan
- 6). Pencairan dilakukan oleh kantor pusat melalui staf administrasi atas aplikasi yang telah disetujui oleh pimpinan cabang
- 7). Jika kredit yang akan dilakukan jumlah pokoknya lebih besar dari standar kantor cabang, maka harus dianalisis dan harus mendapatkan persetujuan dari kantor pusat
- 8). Kurang teliti dalam menganalisis yang dapat menyebabkan kredit bermasalah

Dalam tahap ini seorang *credit analyst* tidak begitu teliti dalam menganalisa setiap aplikasi permohonan kredit yang diajukan debitur. Sering kali *credit analyst* hanya memperhatikan data-data konsumen tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi ke nomor telepon debitur. Apalagi pada waktu akhir bulan, di mana setiap cabang dituntut untuk mencapai target, *credit analyst* bahkan hanya memperhatikan struktur kredit konsumen.

c. Tahap Keputusan Kredit

Keputusan kredit yang berhubungan dengan pengendalian pemberian kredit pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang yaitu atas dasar laporan hasil analisis kredit dengan melalui pengisian formulir-formulir aplikasi kredit. Dari hasil yang dilakukan oleh *Loan Administration Head* dan *credit analyst* dilanjutkan ke kepala cabang untuk memutuskan apakah kredit tersebut disetujui atau tidak.

Dalam tahap ini, aplikasi pasti disetujui oleh kepala cabang tanpa meneliti terlebih dahulu aplikasi tersebut. Kepala cabang hanya melihat komposisi struktur kredit apabila administrasi sesuai maka aplikasi tersebut akan disetujui tanpa melakukan koordinasi dan konfirmasi ke bagian *credit analyst*.

d. Tahap Perjanjian Kredit

Setelah tahap keputusan kredit yang dilakukan PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang disetujui oleh kepala cabang yang kemudian dicetaknya dokumen-dokumen perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari :

- 1). Kesepakatan bersama pembiayaan
- 2). Surat pernyataan bersama
- 3). Surat Kuasa
- 4). Surat persetujuan penutupan asuransi
- 5). Surat persetujuan suami/istri

6). Berita acara serah terima

7). Blanko kwitansi

Setelah dokumen-dokumen perjanjian tersebut telah ditandatangani, maka akan dilakukan pencairan kepada pihak debitur berdasarkan nominal yang telah disepakati. Masalah yang sering muncul dalam tahap ini adalah tidak dilakukannya konfirmasi mengenai tanggal jatuh tempo kepada debitur. Tanggal jatuh tempo biasanya diambil dari tanggal pencairan dana yang belum tentu pada tanggal tersebut debitur tersebut mempunyai dan untuk membayar angsuran.

e. Tahap Pelunasan Fasilitas Kredit

Pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang pembinaan debitur yaitu melakukan pengamatan kredit yang telah diberikan dengan cara menganalisis dan mempelajari informasi atau data-data yang ada pada debitur apakah terdapat tunggakan-tunggakan dalam data operasional apakah semua kewajiban debitur telah dijalankan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau terdapat tunggakan-tunggakan baik pokok maupun bunga.

Walaupun demikian debitur yang melakukan tunggakan-tunggakan hanya diberi peringatan tanpa dilakukan sanksi secepatnya agar debitur tersebut tidak lari atau melarikan diri.

Selain itu lambatnya pengiriman dokumen untuk debitur yang telah disetujui kreditnya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tunggakan dikarenakan di dalam dokumen tersebut terdapat salinan

kontrak kredit yang telah ditandatangani bersama, polis asuransi dan tata cara pembayaran. Sehingga debitur yang belum membayar angsuran menjadikan hal tersebut sebagai alasan menunggak angsuran.

B. Pembahasan

Pengendalian pemberian kredit merupakan faktor yang sangat menentukan tinggi rendahnya kredit macet pada perusahaan. Oleh karena itu perlu dipahami perencanaan dan pengendalian kredit sebelum kredit diberikan kepada konsumen.

Pemahaman terhadap pengendalian perencanaan dan pengendalian kredit dilakukan untuk menilai dan menentukan seberapa jauh aktivitas pengendalian yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian kredit modal kerja yang mengakibatkan kerugian dalam perusahaan.

Tujuan dari perencanaan dan pengendalian penyaluran kredit modal kerja ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam perencanaan dan pengendalian penyaluran kredit modal kerja yang dilakukan oleh pihak bank.

Unsur-unsur perencanaan dan pengendalian pemberian kredit modal kerja yang seharusnya ada dalam prosedur penyaluran kredit dirancang untuk mencapai pengendalian tujuan pokok akuntansi. Proses penyaluran kredit modal kerja adalah tahapan pemberian kredit yang harus dilakukan mulai dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap persetujuan

karyawan itu sendiri maupun oleh karyawan lain yang mengakibatkan karyawan tersebut akan sembarangan dalam melakukan pengecekan.

Sebaiknya seorang credit marketing harus melakukan survey ke rumah atau ke tempat usaha calon debitur serta melakukan survey lingkungan kepada tetangga-tetangga calon debitur untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi dan pihak PT. Bank BTN Tbk harus memberikan sanksi yang tegas bagi karyawan yang tidak melakukan survey agar perilaku tersebut tidak terulang kembali dan juga tidak akan dicontoh oleh karyawan lain sehingga analisa kelayakan konsumen dilakukan dengan sebenar-benarnya dan dapat menghindari kredit macet.

Pihak bank juga harus mengumpulkan informasi-informasi mengenai usaha dan keuangan dari calon debitur guna menganalisa tingkat kemampuan calon debitur dalam pembayaran angsuran dengan lancar. Untuk memperoleh keyakinan debitur mampu melunaskreditnya sebelum melakukan persetujuan pemberian kredit, pihak bank harus telah menetapkan syarat bagi penerima kredit dan ketentuan setelah menerima kredit.

b. Tahap Analisis Kredit

Tahap analisis dan penilaian kredit yang dilakukan oleh supervisor dan credit analyst belum dilakukan dengan baik terutama diakhir bulan. Sering kali aplikasi permohonan kredit yang masuk tidak diperiksa secara teliti dan tidak dilakukannya konfirmasi dan verifikasi kepada konsumen dan dapat menimbulkan kredit macet.

Tahap analisis kredit merupakan tahap penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek permohonan kredit yang meliputi berbagai aspek dan pada umumnya terdiri dari aspek management dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek yuridis, dan aspek sosial ekonomi.

Tahap analisis kredit memerlukan data-data dan informasi yang akurat dan mendalam dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara atau teknik antara lain dengan wawancara atau kunjungan langsung ke tempat usaha. Persetujuan kredit harus berdasarkan analisis yang tajam, data lengkap dan akurat.

Seorang *credit analyst* dituntut untuk melakukan analisa permohonan kredit dengan tepat dan sebaik-baiknya mulai dari kelengkapan dan keaslian data calon konsumen sampai dengan konfirmasi dan verifikasi langsung lewat telepon kepada konsumen untuk menanyakan langsung kepada calon debitur tentang laporan yang sebelumnya dibuat.

Hal ini juga untuk mengetahui apakah *credit marketing* tersebut telah bertemu dan berkunjung ke tempat konsumen dan apakah benar data-data yang dilampirkan oleh *credit marketing* memang data yang sesungguhnya.

Pada saat akhir bulan, sering kali terjadi persetujuan kredit yang dilakukan tanpa meneliti calon debitur. Hal ini dilakukan agar target tercapai tanpa memikirkan hal-hal yang bisa merugikan pihak bank.

Sebaiknya seorang *credit analyst* harus tetap melakukan analisis sebaik-baiknya walaupun pada akhir bulan untuk menghindari kredit macet.

c. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak kreditur melalui pemutusan kredit baik berupa pejabat yang ditunjuk atau pimpinan perusahaan kreditur, masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk disetujui atau tidak. Tahap keputusan kredit dilakukan setelah tahap analisis kredit yang dilaporkan dan direkomendasikan oleh supervisor dan *credit analyst* dilakukan oleh seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan perusahaan,

Aplikasi yang telah sampai ke tahap ini atau tahap keputusan kredit ditentukan oleh kepala cabang apakah layak atau tidak aplikasi kredit tersebut disetujui. Namun aplikasi tersebut pasti disetujui hanya dengan melihat komposisi struktur kredit tanpa menganalisa ulang dan meminta keterangan detail dari *credit analyst*.

Sebaiknya setelah diperoleh hasil analisis pemberian kredit dari bagian *credit analyst*, hasil analisis tersebut harus dilakukan evaluasi ulang oleh kepala cabang PT. Bank BTN Tbk. Bila hasil analisis dianggap tidak sesuai maka hasil analisis dikembalikan untuk dilakukan analisis ulang atau bahkan aplikasi tersebut tidak disetujui. Hal ini dilakukan untuk menghindari analisis yang salah sehingga dapat menghindari kredit macet.

d. Tahap Perjanjian Kredit

Bentuk dan format perjanjian kredit telah ditetapkan oleh masing-masing bank, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal seperti keabsahan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank harus terpenuhi dimana didalamnya harus memuat jumlah kredit / pinjaman, jangka waktu pengembalian kredit/ pinjaman, tata cara pembayaran/ pelunasan kredit serta persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Setelah dokumen-dokumen perjanjian tersebut telah ditandatangani, maka akan dilakukan pencairan kepada pihak debitur berdasarkan nominal yang telah disepakati. Masalah yang sering muncul dalam tahap ini adalah tidak dilakukannya konfirmasi mengenai tanggal jatuh tempo kepada debitur. Tanggal jatuh tempo biasanya diambil dari tanggal pencairan dana yang belum tentu pada tanggal tersebut debitur tersebut mempunyai dan untuk membayar angsuran.

e. Tahap Pelunasan Fasilitas Kredit

Pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang pembinaan debitur yaitu melakukan pengamatan kredit yang telah diberikan dengan cara menganalisis dan mempelajari informasi atau data-data yang ada pada debitur apakah terdapat tunggakan-tunggakan dalam data operasional apakah semua kewajiban debitur telah dijalankan dengan baik sesuai

dengan jadwal yang ditentukan atau terdapat tunggakan-tunggakan baik pokok maupun bunga.

Selain itu lambatnya pengiriman dokumen untuk debitur yang telah disetujui kreditnya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tunggakan dikarenakan di dalam dokumen tersebut terdapat salinan kontrak kredit yang telah ditandatangani bersama, polis asuransi dan tata cara pembayaran. Sehingga debitur yang belum membayar angsuran menjadikan hal tersebut sebagai alasan menunggak angsuran.

Dari hasil pengamatan penulis terhadap pengendalian intern di PT. Bank BTN Tbk atas pemberian kredit sudah cukup baik meskipun begitu masih saja terdapat kekurangan / kelemahan dan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1
Total Kredit Modal Kerja
Periode tahun 2007-2010

Tahun	Total Kredit
2007	144.999.156
2008	658.847.336
2009	1.004.142.453
2010	459.602.348

Sumber data: PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang, 2010

Pada tahun 2007 jumlah pinjaman / kredit mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2010 mulai mengalami penurunan.

Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya informasi dan pengecekan terhadap debitur terutama pada saat keterlambatan penyetoran uang angsuran kredit. Disamping itu juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh bank mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat berakibat kepada kepentingan masyarakat yang tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana saja akan tetapi masyarakat juga sebagai pengguna jasa perbankan.

Selain kurangnya informasi dan pengecekan terhadap debitur juga masih terdapat beberapa hal yaitu :

- 1) Adanya usaha debitur yang bangkrut/ pailit sehingga tidak sanggup lagi untuk melunasi tagihan kreditnya.
- 2) Adanya debitur yang pindah tempat sehingga pihak bank mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan.
- 3) Adanya debitur yang tidak memberikan agunan/ jaminan

Dengan tidak adanya jaminan/ agunan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur, maka status debitur tersebut pun tidak terkait, hal ini membuat pihak bank mengalami kesulitan dalam penagihan pinjaman hal ini membuat pihak bank mengalami kesulitan dalam penagihan pinjaman bila terjadi kredit macet.

4) Tidak adanya izin usaha

Pihak bank akan mengalami kesulitan dalam hal melakukan pendapatan administrasi kredit yang dikarenakan tidak adanya izin usaha resmi dari pemerintahan daerah.

2. Penyelesaian Pengadilan Kredit Macet pada Kredit Modal Kerja di PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang

Meskipun pihak bank telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah kredit yang macet akan tetapi masih saja jumlah kredit yang macet masih cukup tinggi meskipun secara umum dalam pelaksanaan prosedurnya sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Kredit Macet
Periode Tahun 2007-2010

Tahun	Kredit Macet	Realisasi Kredit	Tertagih
2007	140.832.172	144.999.156	4.166.984
2008	597.908.350	658.847.336	60.938.986
2009	345.666.821	1.004.142.453	658.475.632
2010	267.983.214	459.602.348	191.619.134

Sumber : PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang, 2010.

Penyelesaian kredit macet di PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

a. Pendekatan Kredit Macet

Sekalipun bank tidak mengharapkan terjadinya kredit macet dan dengan ditetapkannya KPB secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit macet, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit macet dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Pihak bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit macet.
- 2) Pihak bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit macet.
- 3) Penanganan kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
- 4) Pihak bank tidak melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau izin yang dikenal dengan praktek plafondering kredit.
- 5) Pihak bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit macet, khususnya untuk kredit macet kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

b. Kredit dalam Pengawasan Khusus

Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit-kredit yang akan atau diduga akan merugikan bank, maka pihak

bank wajib melakukan pengawasan secara khusus, minimal setiap bulan pihak bank wajib menyusun daftar atas kredit-kredit yang kolektibilitasnya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Bank BTN Tbk, selanjutnya pihak Bank BTN Tbk melakukan pengawasan secara khusus terhadap kredit-kredit yang termasuk dalam daftar dan segera melakukan penyelesaian.

c. Evaluasi Kredit Macet

Pihak Bank BTN Tbk secara berkala melakukan evaluasi terhadap daftar kredit dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya dengan sasaran untuk mengetahui secara dini apakah kredit dalam pengawasan khusus telah menjadi kredit macet.

Apabila jumlah seluruh kredit yang kolektibilitasnya tergolong Diragunakan dan Macet telah mencapai 75% dari jumlah kredit secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank BTN Tbk, maka direksi Bank BTN Tbk harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Laporan kredit macet
- b. Pembentukan satuan kerja / kelompok kerja / tim kerja penyelesaian kredit macet
- c. Penyusunan program penyelesaian kredit macet
- d. Pelaksanaan program penyelesaian kredit macet
- e. Evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit macet

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan secara jelas mengenai analisis pengendalian sistem penyaluran kredit modal kerja dalam rangka mengatasi terjadinya kredit macet pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang. Berdasarkan uraian dan pembahsan, maka bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran yang didapat dari uraian dan pembahasan sebelumnya.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyaluran kredit modal kerja pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para calon debitur agar permohonan kreditnya dapat dipenuhi oleh pihak bank. Pihak bank juga telah melaksanakan tahap-tahap penyaluran kredit dengan cukup baik, namun kurangnya ketelitian analisis dalam penyaluran kredit masih berpotensi menimbulkan resiko kredit macet yang pada akhirnya dapat merugikan pihak bank.
2. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan telah berjalan secara baik kaerna jumlah angka kredit yang macet telah mengalami penurunan tetapi walaupun angka kredit macet masih cukup tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan masukan-masukan yang dapat dijadikan bahan yang mungkin dapat membantu demi kelancaran dan kemajuan PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang.

1. Dalam perencanaan kredit modal kerja sudah dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan seperti kurangnya informasi dan pengecekan terhadap si debitur. Oleh karena itu, petugas bank sebaiknya lebih teliti dalam menyeleksi para calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit dan debitur harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank BTN Tbk cabang Palembang agar angka kredit yang macet bisa ditekan lebih kecil.
2. Didalam sistem pengendalian internnya sendiri sudah berjalan cukup baik namun meskipun begitu sebaiknya pihak bank perlu lebih teliti dalam semua dokumen yang diberikan oleh si debitur dan hendaknya pihak bank sesekali melakukan survey lapangan terhadap permohonan calon debitur bersama kepala cabang guna untuk menghindari terjadinya kredit fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. Dkk, 2000. **Sistem Pengendalian Manajemen**, Edisi Revisi, Cetakan Pertama YKPN. Yogyakarta.
- Bodnar, 2004. **Sistem Pengendalian Manajemen**, Edisi Pertama, BPFE : Yogyakarta.
- BTN, Bank, 2009. **Laporan Tahunan 20010**, Bank BTN : Palembang.
- BTN, Bank, 2009. **Pelatihan Teller**, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia : Jakarta.
- Ferdy, 2002. **Skripsi**, Fakultas Ekonomi Fakultas Tridinanti : Palembang.
- Maya Ariyanti, 2009. **Manajemen Perkreditan Bank Umum**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, 2006. **Seluk-beluk dan Tehnik Pengolahan Kredit**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, 2002. **Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen**, Edisi Ketiga, Salemba Empat : Jakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supormo, 2000. **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi pertama, BPPE, Yogyakarta.
- Rachmat Firdaus, 2004. **Manajemen Perkreditan Bank Umum**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, 2007. **Dasar-dasar Perkreditan**, Edisi 4, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Veithzal Rivai, M.B.A, Andria Permata Veithzal, B. Acct, M.B.A, 2006, **Credit Management Handbook**, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nomor : 077/II/2012
Perihal : Selesai Riset
Lampiran : 1 Lembar

SURAT KETERANGAN

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tanipo Jaya
Jabatan : Bagian Unit Logistik GBA
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 125 KM 4,5 Palembang


Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fadilla Rainy
Nim : 22 2008 042
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Strata 1 (S-1)

Memang benar telah melaksanakan Studi Riset di PT. Bank BTN Tbk
Cabang Palembang, sebagai bahan pembuatan skripsi.

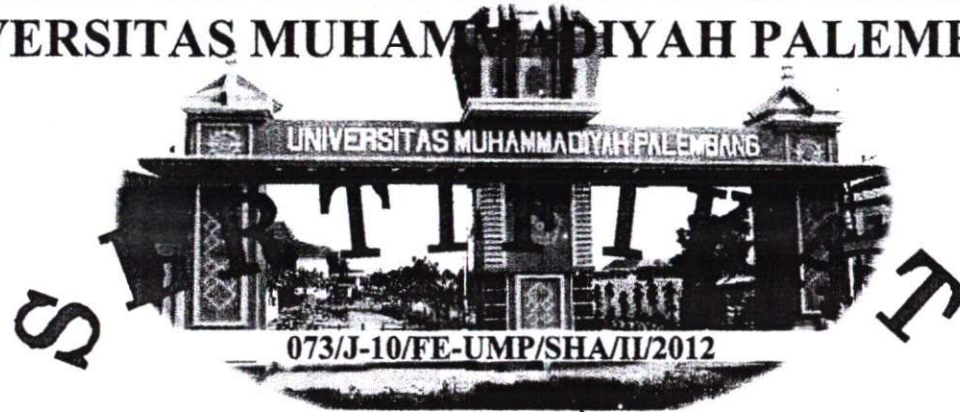
Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami
Bagian Unit Logistik GBA


Tanipo Jaya



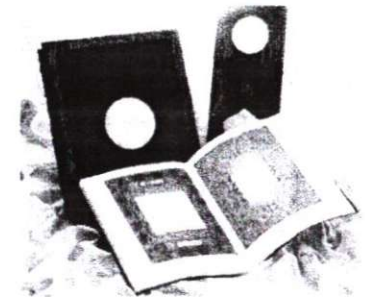
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : FADILLA RAINY
NIM : 222008042
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 17 Februari 2012

an. Dekan

Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433
e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
43	36	42	403

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant

DATE OF REPORT

07/02/2012

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
FADILLA RAINY	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	16-Dec-1990	21-Jan-2012

EXAMINEE'S NUMBER

1218

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

AHASISWA : FADILLA RAINY	PEMBIMBING
: 22 2008 042	KETUA : MIZAN SE, Ak, M.Si
N : AKUNTANSI	ANGGOTA :
SKRIPSI : ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BANK BTN Tbk CABANG PALEMBANG	

SL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
2 - 2012	Ponb I s/d Ponb III	<i>[Signature]</i>		lengkapi up & laudatur teori
2 - 2012	Ponb I s/d Ponb III	<i>[Signature]</i>		perbaiki sekuan surat-kumpul after pembika.
2 - 2012	Ponb I s/d III	<i>[Signature]</i>		see layout & ponb IV
2 - 2012	Ponb IV & V	<i>[Signature]</i>		perbahasa hrs mengumpul peransah laka
2 - 2012	Ponb IV & V	<i>[Signature]</i>		see o/suplls

N
diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, ditung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : 17 / 2 / 2012
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan,
[Signature]
DRS. SENARDI, SE, MSi



BIODATA PENULIS

Nama : Fadilla Rainy
Nim : 22 2008 042
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Mujahidin No. 183 RT. 18 RW. 06 Kel. Talang
Semut 26 Ilir Palembang
Pekerjaan : Mahasiswi
No. Telpn : 0819 5888 2322
Nama Orang Tua
1. Ayah : Nurizal
2. Ibu : Susilawati
Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jl. Mujahidin No. 183 RT. 18 RW. 06 Kel. Talang
Semut 26 Ilir Palembang.

Palembang, 29 Maret 2012
Penulis


Fadilla Rainy



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 3619-D/TK-III/2010
 No. 3623-D/TK-III/2010
 No. 3377-D/TK-III/2009

AKREDITASI

No. 018-BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)
 No. 044-BAN-PT/Ak-XI/S1/II/2011 (B)
 No. 001-BAN-PT/Ak-XI/D6/III/VI/2011 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faksimile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal Ujian : Selasa, 28 Februari 2012
 Waktu Ujian : 13.00 – 17.00 WIB
 Nama Mahasiswa : Fadilla Rainy
 NIM : 22 2008 042
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Sistem Pengendalian Manajemen
 Judul Skripsi : Analisis Perencanaan dan Pengendalian Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank BTN Tbk Cabang Palembang.

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI SERTA
 PEMBIMBING SKRIPSI SEHINGGA DIPERKENANKAN
 UNTUK MENDAFTAR WISUDA**

O	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
	Mizan, S.E., M.Si., Ak	Pembimbing	21 - 03 2012	
	M. Basyaruddin R., S.E., Ak., M.Si.	Ketua Penguji	20 - 03 - 2012	
	M. Orba Kurniawan B, S.E., S.H., M.Si	Anggota Penguji 1	16 - 03 - 2012	
	Drs. Sunardi, S.E., M.Si.	Anggota Penguji 2	14 - 03 - 2012	

Palembang, Maret 2012

An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Sunardi, S.E., M.Si.
 NIDN : 0206046303

ISLAMI & UNGGUL